

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bantuan luar negeri merupakan salah satu kebijakan luar negeri suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Bentuk dari kepentingan nasional juga beragam, seperti kepentingan ekonomi, kepentingan pasokan energi, serta kepentingan politik dan keamanan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, bantuan luar negeri pada pelaksanaannya selalu diikuti oleh motivasi yang beragam seperti yang dilakukan oleh negara-negara pendonor tradisional seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan negara adidaya lainnya (Lancaster, 2007). Amerika Serikat memberikan bantuan luar negerinya untuk mengenalkan dan mempromosikan demokrasi di negara-negara miskin dan berkembang. Motivasi diplomatik dimiliki oleh Prancis ketika memberikan bantuan luar negerinya, sedangkan Jepang menggunakan bantuan luar negerinya untuk dapat membangun hubungan ekonomi dan perdagangan yang baik dengan negara resipiennya (Lancaster, 2007).

Dalam perkembangannya di beberapa dekade terakhir ini, bantuan luar negeri tidak hanya diberikan oleh negara-negara adidaya yang memiliki power besar saja, melainkan negara pendonor juga dapat mengambil peran dalam hal ini, salah satunya adalah China. UN menyatakan bahwasannya China merupakan termasuk kedalam negara berkembang akan tetapi memiliki kedudukan ekonomi

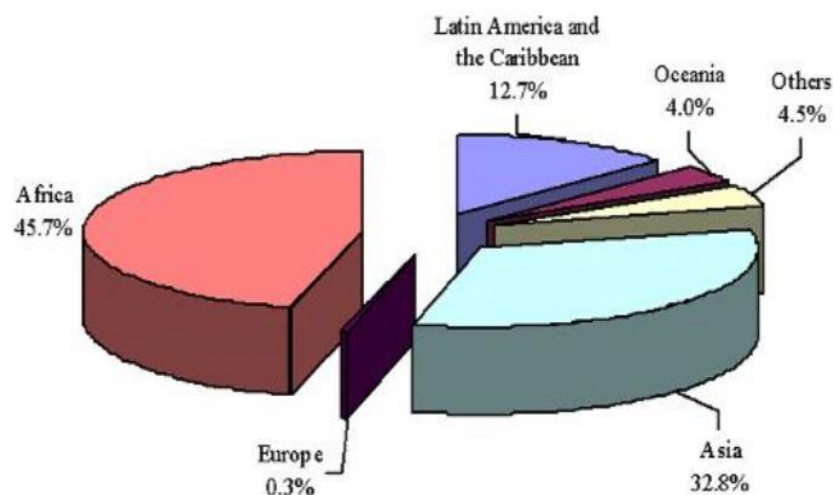
tertinggi kedua didunia (The World Bank, t.t). Hal tersebut dapat dilihat dari kekonsistensi-an China didalam memprioritaskan kebijakan luar negerinya yang ditujukan untuk mempertahankan China yang mandiri, kuat dan bersatu dalam membangun tujuan utama negaranya, yakni pembangunan ekonomi.

Dalam menjalankan perannya sebagai negara yang memiliki kekayaan terbesar kedua didunia, China juga membutuhkan bantuan dan sumber daya dari negara-negara lain, hal tersebut didapatkan oleh China salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri tersebut juga dijadikan jembatan oleh China untuk dapat memenuhi kebutuhan politik dan ekonominya yang didapat dari negara resipien. Seperti yang tertulis didalam *White Paper* (2011) bahwa terdapat tiga sifat bantuan yang diberikan China kepada negara-negara resipien, yakni pinjaman lunak, dan pinjaman tanpa bunga, dan sumbangan dana dalam bentuk hibah. *White Paper* (2011) sendiri menambahkan total bantuan yang diberikan oleh China terhadap negara resipien sejak tahun 1950-an adalah sebesar RMB256,3 miliar. Dana tersebut termasuk pinjaman lunak sebesar RMB73,55 miliar, pinjaman tanpa bunga RMB76,54 miliar, dan dana hibah sebesar RMB106,2 miliar.

Pendistribusian bantuan luar negeri dalam mendukung pembangunan negara-negara berkembang yang diberikan oleh China terbagi menjadi beberapa sektor, seperti sektor industri, pertanian, infrastruktur ekonomi, dan pembangunan fasilitas umum. Amerika Latin, Afrika, Pasifik, dan Asia merupakan kawasan yang rata-rata negaranya menerima bantuan luar negeri China. Lebih jelasnya lagi, bantuan luar negeri China telah tersebar ke 161 negara, antara lain adalah 30 negara

di Asia, 18 di Amerika Latin dan Karibia, 51 di Afrika, 12 di Oceania serta 12 di Eropa Timur (Lynch et al, 2020). Sebanyak 80% bantuan luar negeri China disalurkan ke negara-negara yang berada di Afrika dan Asia yang mana Afrika menempati posisi pertama dalam hal ini. sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:

Grafik 1.1 Distribusi Bantuan Luar Negeri China Secara Geografis Tahun 2009



(Sumber: State Council Information Office of the PRC, April 2011,

“White Paper on China’s Foreign Aid)

Terdapat dua jalur pemberian bantuan luar negeri China, yakni *Official Development Assistance (ODA)* dan *Other Official Flows (OOF)* (Sari, 2017). Sari (2017) menambahkan ODA merupakan bantuan luar negeri China terhadap negara-

negara yang berpenghasilan rendah dan bersifat untuk meningkatkan aktivitas perekonomiannya, sedangkan OOF lebih ditujukan kepada negara-negara yang berpenghasilan tinggi dan bantuan yang diberikan oleh China lebih bersifat pinjaman. DesJardins (2012) menyatakan bahwa ODA merupakan jalur bantuan bantuan luar negeri China melalui lembaga-lembaga resmi. Negara dengan hasil pendapatan per-kapita lebih dari \$9.000 merupakan negara-negara yang berhak menerima bantuan luar negeri China melalui jalur OOF (DesJardins, 2012). Negara-negara yang berhak menerima bantuan luar negeri melalui OOF antara lain adalah Singapura, Israel, Siprus, Bahama dan negara-negara lain yang sebelumnya merupakan bagian dari uni soviet (Sari, 2017).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai dua jalur pemberian bantuan luar negeri China, maka penjelasan selanjutnya adalah mengenai negara-negara yang menjadi tujuan bantuan luar negeri tersebut. Afrika, Asia, *Ocean*, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia merupakan kawasan-kawasan yang sebagian besar negaranya menerima bantuan luar negeri dari China (Lynch et al, 2020). Terhitung sebanyak 161 negara penerima di seluruh dunia yang terlibat didalam kebijakan bantuan luar negeri China (Lynch et al, 2020). Akan tetapi dari 161, hanya 20 negara yang difavoritkan China untuk menjadi negara penerima bantuan (Irawan, 2018). 20 negara tersebut terbagi menjadi dua jalur, yakni ODA dan OOF. Negara-negara yang menerima bantuan luar negeri China melalui jalur ODA antara lain adalah Kuba, Pantai Gading, Ethiopia, Zimbabwe, Kamerun, Nigeria, Tanzania, Kamboja, Sri Lanka, dan Ghana. Sedangkan negara-negara yang menerima bantuan luar negeri China melalui jalur OOF antara lain

adalah Rusia, Pakistan, Angola, Laos, Venezuela, Turkmenistan, Ekuador, Brazil, Sri Lanka, dan Kazakstan (Irawan, 2018).

Dalam hal ini China dan Venezuela memiliki hubungan kerjasama sejak tahun 1999 yang pada saat itu kepemimpinan di Venezuela dikendalikan oleh Hugo Chavez. China mengawali pemberian bantuan luar negerinya terhadap Venezuela pada saat awal tahun 2000-an yang mana pada saat itu Venezuela masih dipimpin oleh Hugo Chavez (Esa, 2017). Venezuela yang pada saat itu menjadi negara yang memiliki cadangan minyak mentah terbesar didunia serta pertumbuhan ekonomi tercepat di Amerika Latin mengalami kerugian yang cukup drastis karena adanya permasalahan ekonomi di negaranya pada awal tahun 2013. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya prekonomian Venezuela adalah proses pengelolaan yang kurang baik terhadap industri minyak. Kondisi jatuhnya perekonomian Venezuela tak hanya disebabkan oleh turunnya harga minyak saja, melainkan juga disebabkan oleh keberlangsungan politik serta ketidakstabilan variabel ekonomi lainnya (Nelson, 2018).

Dalam Ward (2019) dijelaskan bahwa hubungan diplomatik antara China dan Venezuela pertama kali terjalin pada tahun 1974 yang ditandai dengan Venezuela merupakan bagian dari rentetan kerugian diplomatik yang dihadapi China di kawasan Amerika Latin dan Karibia (LAC). Hubungan baik antara China dan Venezuela tetap berjalan dengan baik sepeninggalan Hugo Chavez pada tahun 2013 yang kemudian dilanjutkan oleh Nicolas Maduro (Pina, 2019). Hubungan antara China dan Venezuela sendiri terbagi menjadi dua bidang, yakni ekonomi dan politik. Total bantuan China berupa pemberian pinjaman ke Venezuela sejumlah

US\$60 miliar dari tahun 2000 hingga 2018. Sedangkan untuk investasi, China telah mengeluarkan dana sebanyak US\$6 miliar (Pina, 2019).

Pada tahun 2016, bantuan China terhadap Venezuela sempat terhenti dikarenakan turunnya kembali harga minyak internasional pada tahun itu (Ward, 2019). Alasan lain dari terhentinya bantuan China terhadap Venezuela adalah karena China tidak berani terlalu jauh mengambil resiko dengan terus memberikan dana hutang kepada Venezuela yang pada tahun tersebut perekonomian negaranya semakin menurun dan tidak ada kepastian waktu dari Venezuela untuk dapat membayarkan hutang-hutang negaranya di masa mendatang (Ward, 2019). Kemudian hubungan kerjasama antara China dan Venezuela kembali terjalin pada tahun 2018 yang ditandai dengan kunjungan Nicolas Maduro ke China untuk secara langsung meminta bantuan kepada Xi Jinping guna menghadapi krisis negaranya yang semakin tinggi. Hal ini kemudian direspon dengan baik oleh China dengan kembali memberikan bantuan terhadap Venezuela berupa pasokan dana untuk pembangunan dan peningkatan produksi kekayaan alam Venezuela seperti emas dan minyak serta melakukan investasi untuk 500 proyek yang ada di Venezuela (Pina, 2019).

Terhentinya bantuan China pada tahun 2016 yang kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2018 menjadi alasan dan fokus utama penulis untuk mencari kejelasan serta motif dibalik bantuan luar negeri China terhadap Venezuela. Mengingat krisis ekonomi di Venezuela pada tahun 2016 dan 2018 tidak jauh berbeda. Maka dalam hal ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan motif China yang kembali memberikan bantuan terhadap Venezuela pada tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan, mengapa China kembali memberikan bantuan luar negeri terhadap Venezuela saat terjadi krisis moneter tahun 2018 dimana sebelumnya sempat terhenti pada tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan motif perubahan kebijakan China didalam memberikan kembali bantuan luar negerinya terhadap Venezuela pada tahun 2018 setelah sebelumnya bantuan dari China sempat terhenti pada tahun 2016.

1.4 Kerangka Pemikiran

Sebelum dilakukan penelitian oleh penulis, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai penelitian dengan tema perubahan kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain.

Penelitian pertama yakni mengenai perubahan kebijakan antara China dengan Korea Selatan. Seperti yang dijelaskan oleh Antania et al (2019) China dan Korea pada awalnya memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Akan tetapi karena adanya rencana pemasangan anti-misil yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang bernama THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Dengan adanya THAAD, hubungan antara China dan Korea Selatan memburuk pada pertengahan

tahun 2016 hingga pada akhirnya kembali membaik pada akhir tahun 2017 (Antania et al, 2019).

Alasan pertama dari kembali dijalinnya hubungan bilateral antara China dan Korea Selatan adalah agar hubungan diplomatik antara kedua negara dapat terus berjalan dengan baik. Kemudian alasan kedua dari kembali dijalinnya hubungan bilateral antara China dan Korea Selatan adalah karena kedua negara ingin mempertahankan keuntungan yang didapat melalui kerjasama ekonomi. Dengan kata lain, kedua negara memiliki sifat interdependensi (saling ketergantungan) antara satu dengan yang lain. Seperti China membutuhkan investasi dari Korea Selatan sebagai penyokong ekonominya. Selain investasi, Korea Selatan juga menjadi komoditas pemasok alat-alat permesinan bagi China.

Seperti yang diketahui bahwa Korea Selatan merupakan negara terbesar yang menyediakan mesin industri berteknologi tinggi yang dapat mendukung industri manufaktur China (Wong, 2019). Sedangkan China menjadi lahan pasar bagi Korea Selatan untuk memasarkan hasil *entertainment*-nya. Melick & Salidjanova (2017) menjelaskan bahwa China merupakan pasar kedua terbesar yang dimiliki oleh Korea Selatan untuk memasarkan hasil *entertainment*-nya seperti musik, Korean Wave, dan serial drama. Tidak hanya *entertainment*, Korea Selatan juga membutuhkan China sebagai pemasok barang industri retail dan penyumbang turis asing terbesar di negaranya (Antania et al, 2019).

Sejalan dengan tema penelitian sebelumnya, penelitian kedua adalah mengenai perubahan kebijakan antara Amerika serikat dengan Kuba. Seperti yang dijelaskan oleh Basuki (2018) pada awalnya AS dan Kuba memiliki hubungan

diplomasi yang cukup baik. Akan tetapi situasi berubah pada tahun 1960, tepatnya pada saat terjadi revolusi Kuba yang dimotori oleh Fidel Castro. Revolusi ini memiliki maksud untuk menasionalisasikan seluruh perusahaan yang terdapat di Kuba, termasuk perusahaan-perusahaan AS dan properti milik warga negaranya sendiri. Hal tersebut kemudian menyebabkan diputusnya hubungan diplomasi antara AS dengan Kuba yang ditandai dengan sanksi berupa embargo ekonomi yang diberikan oleh AS secara parsial terhadap Kuba.

Tidak hanya itu, AS juga menutup kedutaan besarnya yang ada di Havana, Kuba, dan menutup kedutaan besar Kuba yang ada di Washington (Basuki, 2018). Hingga pada tahun 1962, serangkaian konflik antara kedua negara semakin parah dengan ditandainya keberpihakan Kuba terhadap Uni Soviet untuk melawan AS pada perang dingin yang mana hal tersebut berujung pada pemberian sanksi embargo total AS terhadap Kuba dan *Cuban Missile Crisis* (Cuban Research Institute, t.t.). Kemudian pada tahun 2016, tepatnya pada saat AS dipimpin oleh Barack Husein Obama, AS akhirnya kembali melakukan normalisasi hubungan diplomasi dengan Kuba yang ditandai dengan kunjungan resmi yang dilakukan oleh Obama ke Havana dan dibukanya kembali dua kedutaan di kedua ibukota negara.

Normalisasi hubungan diplomasi tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor pendorong, salah satunya adalah pola pemikiran Obama yang merubah pendekatan isolasi menjadi *engagement* (Leogrande & Kornbluh, 2015). Dengan kata lain, kebijakan isolasionis tidak lagi efektif apabila digunakan pada era saat ini. Obama berpendapat bahwa ideologi Kuba yang telah bertahan selama kurang

lebih dari setengah abad tidak mudah untuk dirubah dan tidak lagi mengancam keamanan nasional AS. Obama juga berpendapat bahwa ketegangan antara AS dan Kuba selama lima dekade terakhir tidak hanya menyebabkan gagalnya merubah situasi dan kondisi yang sesuai dengan kepentingan nasional AS, melainkan juga merusak citra AS dalam dunia politik internasional sehingga AS dikenal sebagai negara yang penuh arogansi dan berpotensi untuk mengancam keamanan negara lain (Basuki, 2018).

Penelitian selanjutnya yakni mengenai perubahan kebijakan Filipina dengan China pada saat masa pemerintahan Rodrigo Duterte tahun 2016 (Lubis, 2017). Hubungan buruk antara Filipina dan China dimulai ketika kembali memanasnya permasalahan mengenai sengketa Laut China Selatan. Hal tersebut ditandai dengan pengajuan sikap keberatan yang dilakukan oleh Presiden Aquino atas China yang pada saat itu melakukan klaim terhadap Laut China Selatan melalui Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda. Hingga akhirnya pada tahun 2016, pada saat kepemimpinan Presiden Duterte, Filipina mengubah haluan kebijakan mereka yang awalnya anti China menjadi memiliki hubungan baik dengan China (Lubis, 2017). Alasan yang melatarbelakangi dari dijalinnya kembali hubungan baik antara Filipina dengan China adalah penandatanganan 13 kerjasama bilateral yang terjalin antara kedua negara. 13 kerjasama tersebut antara lain yakni bidang ekonomi, budaya, pariwisata, anti-narkotika, kelautan, pariwisata, serta pembentukan komite yang memiliki tujuan yang sama yakni menjaga pantai yang masih dalam kategori sengketa. Dengan kata lain, kembali terjalinnya hubungan baik antara Filipina

dengan China adalah karena kedua negara memiliki kepentingan yang sama baik secara ekonomi maupun terhadap konflik Laut China Selatan.

Penelitian pertama menyatakan bahwa alasan dari dijalinnya kembali hubungan antara China dengan Korea Selatan yang sempat berhenti adalah karena kedua negara saling mempertahankan keuntungan ekonomi yang didapat dari kedua negara. Fokus dari kerjasama antara China dengan Korea Selatan adalah pemberdayaan pasar yang ada di kedua negara yang mana China menjadi negara pasar terbesar dari hasil *entertainment* Korea Selatan, sedangkan Korea Selatan menjadi negara pemasok barang industri retail terbesar yang dimiliki oleh China (Antania et al, 2019). Hal tersebut tentu jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Venezuela, yang mana Venezuela merupakan negara penghasil minyak mentah terbesar yang ada di Amerika Latin sedangkan Korea Selatan menjadi salah satu negara penghasil barang industri retail terbesar di kawasan Asia Timur.

Kemudian untuk penelitian kedua, alasan dari dijalinnya kembali hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba adalah karena kedua negara ingin melakukan normalisasi hubungan diplomatik yang sebelumnya sempat terputus. Hal tersebut tentu bertolakbelakang dengan permasalahan yang terjadi antara China dengan Venezuela mengingat hubungan diplomatik antara kedua selalu berjalan dengan baik. Dengan kata lain, hanya bantuan dari China saja yang sempat terhenti, akan tetapi hubungan baik antara kedua negara tetap berjalan (Ward, 2019).

Penelitian yang terakhir yakni perubahan kebijakan antara Filipina dengan China. Alasan dari dijalinnya kembali hubungan antara kedua negara tersebut adalah karena kepentingan ekonomi dan memiliki beberapa kesamaan kepentingan

di sengketa Laut China Selatan. Kondisi tersebut berbeda dengan yang dialami antara China dengan Venezuela karena kedua negara sama-sama tidak memiliki kepentingan di wilayah lain. Dengan kata lain, kepentingan antara China dengan Venezuela dipengaruhi oleh ambisi China untuk memperkuat stabilitas hegemoni. Stabilitas hegemoni dalam pandangan neoliberalisme melihat bahwa pentingnya pemenuhan kebaikan bersama dengan asumsinya melihat sulitnya mewujudkan aturan untuk menjaga stabilitas perdagangan internasional dan menyediakan bantuan finansial bagi negara yang dihadapkan krisis karena adanya kondisi dunia internasional dengan distribusi kekuatan yang terbagi rata di antara negara (Wyatt-Walter, 1966).

Stabilitas hegemoni dapat dilihat dari beberapa upaya China seperti OBOR, *global supply* dan pengamanan pasokan energi. Perlu dipahami bahwa stabilitas hegemoni yang diusung oleh China berbeda dengan hegemoni Inggris, Amerika Serikat atau bahkan Uni Soviet. Hegemoni China tidak didasarkan pada upaya penyebaran ideologis dan pengaruh secara riil di pemerintahan negara lain. Pengaruh China sebagai hegemon didorong oleh kepentingan ekonomi untuk menggandeng negara lain sebagai mitra dagang utama. Internasionalisasi China ini terlihat dalam ambisi pembentukan OBOR dimana China memberikan bantuan finansial pada wilayah-wilayah strategis. Pergerakan China ini pada akhirnya menggeser preseden negara besar lainnya sehingga negara yang termasuk dalam OBOR akan mulai condong terhadap China. Hal ini menyebabkan terjadinya eksklusivitas dari negara besar yang kemudian digantikan oleh keberadaan China

dengan dana pinjamannya. *Global supply* memperkuat posisi OBOR dengan memberikan akses transaksi perdagangan ke dalam pasar China yang besar.

Akses perdagangan ini kemudian menyisihkan argumen ‘jebakan hutang’ sebagai intensi China untuk menguasai aset negara lain. *Global supply* lebih diutamakan daripada jebakan hutang karena terdapat hubungan mutualisme yang mendekatkan China dengan negara lain secara ekonomis. Jika secara ekonomis terjadi hubungan yang saling menguntungkan, setidaknya secara pertimbangan rasional negara tersebut tidak akan menyisihkan China sebagai salah satu mitra pentingnya. Dengan besarnya ekonomi China, negara yang menikmati akses *supply* yang besar kemudian akan menjadi pemasok kebutuhan China. Artinya, negara tersebut akan cenderung mendukung kepentingan China mengingat mitra utamanya selalu memberikan transaksi yang menguntungkan. Selanjutnya, sebagai negara dengan laju industrialisasi yang tinggi, China akan memprioritaskan komoditas energi untuk mengamankan pasokan energi kebutuhan domestik. Tingkat impor energi China yang terus merangkak naik pada akhirnya menarik minat berbagai negara penghasil energi fosil untuk menjadi mitra utama. Berdasarkan uraian tersebut, stabilitas hegemoni adalah motif utama China untuk mempertahankan OBOR, *global supply* dan keamanan energi.

Dari ketidaksesuaian penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis, maka penulis akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang menjadi kebutuhan topik yang telah ditentukan. Apabila pada penelitian-penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa perubahan kebijakan bantuan luar negeri dari beberapa negara tersebut didasari oleh

pasar industri, normalisasi hubungan dipomatik, dan kesamaan kepentingan pada wilayah tertentu. Maka penulis menggunakan konsep stabilitas hegemonik untuk menjelaskan motif China yang dielaborasi dalam tiga pendekatan, yaitu pembentukan OBOR, *global supply* dan pengamanan pasokan energi.

Seperti yang dijelaskan oleh Medina (2017) hadirnya *one belt one road* mendorong China untuk semakin menyebarkan yuan dan memperluas bantuannya terutama kepada wilayah-wilayah yang masuk kedalam kebijakan tersebut. OBOR sendiri ditujukan oleh China untuk menciptakan platform terbesar didunia dalam hal kerjasama ekonomi, kolaborasi perdagangan dan pembiayaan, serta kerjasama sosial dan budaya (Magri, 2017). (Magri, 2017) OBOR menjadi faktor pendorong terjalannya sebuah bantuan luar negeri dan komitmen kerjasama untuk mengurangi hambatan perdagangan di Eurasia dengan cara meningkatkan jaringan konektivitas di seluruh wilayah Asia Timur hingga Afrika Utara. OBOR juga merupakan landasan utama dari adanya bantuan luar negeri yang diberikan oleh China dengan harapan kedepannya bisa membuka jalur ekonomi tambahan di luar negeri dengan janji mendorong pertumbuhan bersama, tata kelola global, dan integrasi regional (Claudio, 2016). Adanya OBOR juga diharapkan mampu memberikan peningkatan konektivitas dalam skala lintas benua (Claudio, 2016). OBOR adalah program nyata dari China untuk melegitimasi langkahnya didalam menguasai perekonomian dunia (Hartono, 2016).

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, faktor kedua yang mendorong diberlakukannya bantuan luar negeri oleh China adalah karena faktor pemenuhan *Global Supply*. Produk Cina telah memperoleh akses yang lebih besar ke pasar

dunia dan pada saat yang sama, negara anggota WTO lainnya telah diizinkan untuk meningkatkan akses ke pasar Cina yang sedang tumbuh (Agarwal & Wu, 2003). Peningkatan jumlah bantuan luar negeri China yang diberikan secara langsung dan bertahan selama bertahun-tahun merupakan salah satu indikasi utama meningkatnya tingkat kepercayaan investor di China (Fung et al, 2003). Ekspansi yang dilakukan selama dua dekade terakhir mengakibatkan perdagangan antara China dengan negara dunia telah tumbuh dari US\$500 menjadi US\$2,17 triliun (Potts & Runnals, 2008). Meningkatnya proses pemenuhan *Global Supply* menjadikan China sebagai negara yang memiliki arus perdagangan terbesar di seluruh dunia (Mashayekhi, 2015). Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan industri dengan tujuan yang lebih luas melalui langkah-langkah netral persaingan daripada hanya melindungi industri yang sakit atau mengalokasikan sumber daya ke dalam industri (Mashayekhi, 2015).

Pada penelitian selanjutnya dijelaskan bahwa motif dan tujuan dari bantuan luar negeri China terhadap negara lain adalah untuk menjaga keamanan pasokan energi. Copper (2016) mengatakan bahwa dibalik bantuan luar negeri yang diberikan kepada negara dunia ketiga, China mengharapkan adanya timbal balik seperti pemberian pasokan sumber daya alam dan energi untuk memenuhi faktor keberlangsungan ekonominya. Bantuan luar negeri China terhadap Kuba tak lepas dari keinginan China untuk mengamankan pasokan energi seperti nikel, gula, dan minyak bumi (Copper, 2016). Sebagai ganti dari adanya bantuan luar negeri yang dilakukan oleh China, maka Venezuela akan mengirimkan pasokan minyak mentah sebagai alat ganti pembayaran (Esa, 2017). Venezuela menjadi pemasok minyak

mentah teratas dari Amerika Latin untuk China, yakni sebesar 4.2 ton (Corrin, 2009). Bantuan luar negeri yang diberikan melalui *Shanghai Cooperation Organization* merupakan salah satu upaya China untuk memenuhi kebutuhan energi nasionalnya (Alexander, 2018).

Dari ketiga pendekatan telah dijelaskan oleh penulis, maka motif yang paling sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi antara China dengan Venezuela adalah menjaga keamanan pasokan energi. Pada pendekatan pertama terdapat argumen yang menyatakan bahwa salah satu alasan diberlakukannya kerjasama OBOR adalah karena suatu negara memiliki kesamaan budaya dan sosial dengan China (Magri, 2017). Tentu hal ini tidak dapat digunakan untuk menganalisa kondisi yang ada di Venezuela, mengingat budaya dan kehidupan sosial yang ada di Venezuela jauh berbeda dengan apa yang ada di China. Kemudian pendekatan kedua yang menyatakan bahwa motif China memberikan bantuan luar negeri adalah untuk memenuhi pasokan *Global Supply* dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Venezuela. Hal tersebut dikarenakan kerjasama antara China dengan Venezuela lebih ke kepentingan untuk mengamankan pasokan energi, bukan untuk menjalankan arus perdagangan pasar. Dengan demikian argumen yang dapat digunakan pada penelitian ini adalah bahwa didalam memberikan bantuan luar negerinya, China memiliki tujuan untuk mengamankan kepentingannya, yakni mengamankan pasokan energi dari Venezuela. Hal ini menarik untuk diteliti karena China berupaya untuk mempertahankan kepentingannya dengan melanjutkan kembali pemberian bantuan luar negerinya terhadap Venezuela pada tahun 2018 meskipun sebelumnya sempat memutuskan untuk berhenti pada tahun 2016.

Bahasan dalam topik ini adalah motif perubahan kebijakan bantuan luar negeri China terhadap Venezuela pada tahun 2018 yang mana hal tersebut didasari oleh kepentingan China didalam menjaga keamanan pasokan energi yang dimiliki oleh Venezeula. Pascual & Elkind (2010) mengatakan bahwa keamanan energi berhubungan dengan empat hal, yakni ketersediaan, keandalan, keterjangkauan, dan keberlanjutan.

Pertama adalah ketersediaan. Ketersediaan energi merupakan sebuah kondisi yang mana negara konsumen mampu menjamin pasokan energi yang dibutuhkan. Dengan kata lain, suatu negara harus dapat mendapatkan jumlah energi tertentu yang dibutuhkan. Guna mendapatkan energi, negara yang membutuhkan harus menjalin hubungan secara intens terhadap negara-negara yang menjadi pemasok dari energi tersebut. Hubungan tersebut dapat dijalin melalui dua cara, yakni dengan adanya investasi jangka panjang maupun bantuan secara langsung dari negara importir ke negara eksportir (Willrich, 1975).

Kedua adalah keandalan. Keandalan memiliki definisi sejauh mana energi yang diterima aman dari segala macam bentuk permasalahan dan gangguan. Permasalahan tersebut juga beragam, dapat berasal dari ancaman terorisme, intervensi politik, hubungan diplomatik dengan negara lain yang kurang baik, hingga perubahan cuaca ekstrim (Pascual & Elkind, 2010). Untuk menghindari gangguan dan permasalahan, suatu negara dapat melakukan diversifikasi terhadap sumber pasokan energi. Dengan kata lain, negara importir dapat memperkuat jaminan pasokan energi yang dibutuhkan dari negara lain dengan mengambil pasokan minyak tidak hanya dari satu negara, melainkan dari banyak negara.

Seperti yang disampaikan oleh Williams (2018) bahwa jika ada sesuatu yang disetujui oleh pembuat kebijakan dalam menangani masalah keamanan energi, maka lebih banyak pilihan lebih baik daripada sedikit. Karena mendorong keragaman produksi minyak yang lebih besar memiliki manfaat jelas bagi semua pelaku pasar.

Ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan dapat diartikan sebagai energi yang dibutuhkan memiliki harga yang terjangkau dan relatif stabil. Seperti yang telah diketahui bahwa harga komoditas energi dapat berubah sewaktu-waktu dengan perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu negara perlu menentukan pasokan energi yang memiliki harga yang relatif stabil. Harga yang diberikan oleh negara eksportir harus transparan. Dengan demikian negara importir tidak hanya mempertimbangkan harga di masa sekarang, melainkan juga untuk di masa mendatang (Pascual & Elkind, 2010).

Keempat adalah keberlanjutan. Keberlanjutan bisa diartikan sebagai pasokan energi yang dibutuhkan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dari sumber energi tersebut (Williams, 2018). Dalam mengelola energi, suatu negara harus memperhatikan dampak yang diakibatkannya seperti polusi dan emisi gas rumah kaca. Dengan kata lain, pengelolaan energi harus memperhatikan lingkungan sekitar dengan tetap meminimalisir dampak polusi yang sekiranya akan terjadi.

Dari keempat aspek tersebut penulis melihat bahwa dalam motif perubahan kebijakan bantuan luar negeri China terhadap Venezuela pada tahun 2018 yang mana hal tersebut didasari oleh kepentingan China didalam menjaga keamanan pasokan energi yang dimiliki oleh Venezeula dapat dilihat dari tiga aspek saja yaitu

ketersediaan, keandalan, dan ketejangkauan. Sedangkan pada aspek keberlanjutan penulis tidak melihat adanya korelasi aspek tersebut dalam penelitian ini.

1.5 Hipotesis

Motif perubahan kebijakan bantuan luar negeri China terhadap Venezuela pada tahun 2018 adalah karena China berupaya untuk menjaga keamanan pasokan energi yang didapat dari Venezuela melalui aspek ketersediaan, keandalan, dan keterjangkauan yang mendorong China untuk melanjutkan kembali pemberian bantuan luar negerinya terhadap Venezuela pada tahun 2018 meskipun sebelumnya sempat memutuskan untuk berhenti pada tahun 2016.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Konseptualisasi dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Keamanan Pasokan Energi

Berbicara mengenai keamanan pasokan energi juga berhubungan dengan konsep utama yakni bantuan luar negeri. Berdasarkan definisi dari Lancaster (2007), bantuan luar negeri merupakan salah satu kebijakan luar negeri suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Bentuk dari kepentingan nasional juga beragam, seperti kepentingan ekonomi, kepentingan pasokan energi, serta kepentingan politik dan keamanan. Sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, bantuan luar negeri pada pelaksanaannya selalu diikuti oleh motivasi yang beragam seperti yang dilakukan oleh negara-negara pendonor tradisional seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan negara adidaya lainnya. Dalam penelitian ini, peran negara pendonor dalam bantuan luar negeri seperti China

memprioritaskan kebijakan luar negerinya yang ditujukan untuk mempertahankan China yang mandiri, kuat dan bersatu dalam membangun tujuan utama negaranya, yakni pembangunan ekonomi. Bantuan luar negeri tersebut juga dijadikan jembatan oleh China untuk dapat memenuhi kebutuhan politik dan ekonominya yang didapat dari negara resipien. Bantuan luar negeri China terhadap negara lain adalah untuk menjaga keamanan pasokan energi.

Berdasarkan definisi Copper (2016) bantuan luar negeri China terhadap negara lain adalah untuk menjaga keamanan pasokan energi dibalik bantuan luar negeri tersebut yang diberikan kepada negara dunia ketiga, China mengharapkan adanya timbal balik seperti pemberian pasokan sumber daya alam dan energi untuk memenuhi faktor keberlangsungan ekonominya. Dalam penelitian ini, operasionalisasi keamanan pasokan energi menurut Pascual & Elkind (2010) diturunkan ke dalam tiga aspek yaitu aspek ketersediaan, aspek keandalan, dan aspek keterjangkauan. Pertama, aspek ketersediaan diperoleh melalui data yang disajikan dalam bab dua. Kedua, aspek keandalan diperoleh melalui data yang disajikan dalam bab tiga. Ketiga, aspek keterjangkauan diperoleh melalui data yang disajikan dalam bab empat, yang kemudian ketiganya dianalisis ke dalam bab lima.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data-data sekunder. Data tersebut diperoleh dan dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, berita, serta laporan yang

tertulis dari organisasi internasional baik itu tercetak melalui surat kabar maupun online.

1.6.3. Teknik Analisis Data

Teknik penulisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang dimaksud yakni dilakukan melalui analisis informasi yang didapat dalam bentuk kalimat. Sedangkan data dalam bentuk angka hanya digunakan penulis sebagai penguat argumen dan pernyataan.

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup pembahasan mengenai bantuan moneter yang dilakukan oleh China kepada Venezuela melalui pendekatan keamanan pasokan energi. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini dilakukan guna memfokuskan pembahasan agar dapat disajikan secara komprehensif serta menekankan adanya pendekatan dan motif dari China dibalik kembalinya bantuan moneter tersebut. Jangkauan penelitian ini dimulai pada tahun 2016 ketika China menghentikan bantuan moneternya kepada Venezuela, setelah bertahun-tahun China tidak pernah absen mendukung Venezuela. Adapun hal yang melatarbelakangi pemberhentian ini dikarenakan masa perjanjian yang telah habis, serta turunnya kembali harga minyak internasional pada masanya. Batas akhir penelitian dipilih hingga pada tahun 2018 karena pada tahun tersebut China kembali memainkan perannya sebagai penyokong Venezuela, setelah dua tahun sebelumnya sempat berhenti. Namun begitu penulis tidak menutup kemungkinan untuk

memasukkan data-data di luar jangkauan penelitian, jika bermanfaat dan berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, dan metodologi.

Bab II: Aspek Keandalan berisi pemaparan mengenai konsumsi energi dan peran perusahaan energi China, dinamika hubungan CDB dan Venezuela, serta peran CDB dan eksistensi China pasca krisis tahun 2018.

Bab III: Aspek Ketersediaan berisi pemaparan mengenai perjanjian *oil for loan* dan dinamika suplai minyak antara Venezuela dan China, aspek keamanan antara China dan Venezuela dalam menjaga keamanan pasokan energi, serta aspek keamanan yang ditawarkan oleh Venezuela sebagai negara penyuplai.

Bab IV: Aspek Keterjangkauan berisi pemaparan mengenai posisi minyak Venezuela dalam cadangan energi domestik China, aspek suplai minyak yang ditawarkan Venezuela untuk industri China, fluktuasi harga minyak dunia serta dampaknya bagi hubungan China dan Venezuela.

Bab V: Analisis.

Bab VI: Kesimpulan.